

Diduga Jadi Lokasi Transaksi Prostitusi, Warung di JLS Cilegon Dibongkar

CILEGON (IM)- Satpol PP membongkar puluhan warung yang diduga dijadikan sarana transaksi prostitusi di Jalan Lingkar Selatan (JLS) Cilegon. Warung semipermanen itu dibongkar lantaran dianggap melanggar Perda.

Kepala Satpol PP Kota Cilegon, Juhadi M Syukur mengatakan pihaknya banyak mendapat laporan masyarakat bahwa beberapa warung di sepanjang JLS menjual minuman keras dan dijadikan sarana transaksi prostitusi.

Selain itu, warung-warung tersebut tampak berdekatan dengan tempat hiburan malam di sepanjang JLS. Atas laporan itu, pihaknya terpaksa membongkar warung-warung tersebut.

"Waduh udalah kita ini setiap hari dimaki-maki sama masyarakat, tuh gubuk (jual) miras tuh, pecel lele miras, anu miras, berarti bukan lagi pemberdayaan lagi, berarti melanggar Perda yang tentunya hari ini setelah kita itung-itung pelanggaran, hari inilah kita bongkar," katanya kepada wartawan, Selasa (26/10).

Satpol PP menganggap warung tersebut melanggar Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelanggaran Kesusilaan, Minuman Keras, Perjudian, Narkotika, Psikotropika, dan Dzat Adiktif lainnya. Perda itu memuat aturan yang melarang kegiatan usaha yang menjual miras, narkoba, dan lainnya.

"Dasarnya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2001. Siapapun orang atau badan hukum yang melanggar Perda itu, maka kita tidak lanjut sesuai proses, prosedur, ada pengawasan, penindakan," kata dia.

"Kan melanggar semua Perda Nomor 5 Tahun 2001. Kan nggak boleh miras, nggak boleh prostitusi. Walaupun prostitusinya nggak di sini, inilah tempatnya untuk mencari prostitusi itu," lanjutnya.

Proses pembongkaran warung itu sempat mendapat protes dari pemilik warung. Adu mulut antara Satpol PP dan pedagang tak terhindarkan, meski begitu, situasi terkendali dengan mendapat pengalangan dari pihak kepolisian dan TNI. ● pra



IDN/ANTARA

PENGUNAAN APLIKASI PEDULI LINDUNGI DI PASAR TRADISIONAL

Pengunjung memindai kode batang pada aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki Pasar Anyar, Kota Tangerang, Banten, Selasa (26/10). Pemerintah Kota Tangerang mulai menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki pasar tradisional sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19.

Dindik Tangsel Siapkan PTM Tahap Kebiasaan Baru pada November 2021

PTM terbatas (tahap adaptasi) di Tangsel berjalan baik, lancar dan sesuai harapan kita. Kalau dua bulan aman, tidak ada paparan virus, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu tahap kebiasaan baru, ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Taryono.

TANGSEL (IM)- Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang Selatan menyatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas di Tangsel berjalan baik sejak berlangsung 6 September 2021. Dengan sejumlah evaluasi, Dinas Pendidikan Kota Tangsel mengaku siap menjalani PTM masa kebiasaan baru yang rencananya bakal diterapkan pada November

2021 mendatang. "PTM terbatas (tahap adaptasi) di Tangsel berjalan baik, lancar sesuai harapan kita. Kalau dua bulan aman, tidak ada paparan virus, maka dilanjutkan dengan tahap berikutnya yaitu tahap kebiasaan baru," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangsel, Taryono, Selasa (26/10).

Dia mengatakan, hingga

saat ini tidak ada kasus terkonfirmasi positif Covid-19 yang muncul pada warga sekolah dari berlangsungnya PTM terbatas dari awal September hingga saat ini. Taryono menyebut, tes acak dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tangsel kepada sejumlah warga sekolah di Tangsel.

"Dinkes sedang melakukan tes swab antigen, baik kepada guru, pegawai, maupun siswa, dan hasilnya negatif semua. Tidak semua siswa, sampling modelnya, diambil acak. Saya tidak tahu sudah berapa persisnya sekolah karena memang itu dilaksanakan oleh puskesmas terdekat dengan sekolah masing-masing," jelasnya.

Pelaksanaan PTM di masa kebiasaan baru, kata Taryono, mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Aga-

ma, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 tahun 2021 Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

Dalam aturan tersebut, ada beberapa aturan yang sebelumnya berupa larangan, nantinya saat penerapan PTM di masa kebiasaan baru bakal diperbolehkan. Secara umum, penerapan protokol kesehatan tetap menjadi utama dalam pelaksanaan pembelajaran offline, baik PTM terbatas maupun PTM masa kebiasaan baru.

"Perbedaannya, salah satunya di masa adaptasi (PPKM terbatas) itu kantin enggak boleh buka. Nanti (PTM masa kebiasaan baru) kantin boleh buka, tapi dengan syarat-syarat penjual atau pedagang di kantinnya su-

dah vaksin. Kemudian kegiatan outing atau kegiatan di luar kelas termasuk olahraga, kegiatan ekstrakurikuler, boleh dilaksanakan dengan catatan tetap menjaga proses," terangnya.

Contoh lainnya, yakni aturan pada masa PTM terbatas atau masa adaptasi di mana orang tua siswa tidak boleh masuk ke area sekolah akan berbeda pada masa kebiasaan baru. Para orang tua siswa nantinya boleh masuk ke kawasan sekolah dengan menerapkan sejumlah protokol kesehatan yang ketat.

"Rencananya dalam waktu dekat, kan PTM terbatas sejak 6 September, jadi dua bulan kemudian berarti 6 November, kami memperbarui, menetapkan sekolah-sekolah mana yang bisa kita terapkan sebagai sekolah pelaksana PTM (masa kebiasaan baru)," jelasnya. ● pp

SDN Kiarapayung di Tangerang Disegel Warga

TANGERANG (IM)- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kiarapayung di Kampung Kayu Item, Desa Kiarapayung, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disegel oleh warga. Warga mengaku sebagai ahli waris pemilik lahan tempat sekolah itu berada.

Selasa (26/10), ahli waris pemilik tanah yang bernama Muhidin mengatakan, ahli waris mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah tersebut pada 2019. Putusan pengadilan pada 9 Juni 2020 memenangkan gugatan ahli waris perihal hak atas tanah yang digunakan untuk membangun sekolah. "Lahan yang menjadi sengketa itu seluas kurang lebih 3.000 meter yang dipakai sekolah," kata Muhidin.

Menurut dia, ahli waris pemilik tanah memutuskan untuk menyegel sekolah karena Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak juga menindaklanjuti putusan pengadilan dengan memberikan ganti dana hak atas tanah yang telah dipakai untuk sekolah ke ahli waris. "Kami sudah upaya pendekatan ke pemda juga, hanya lisan, ketemu sudah. Sudah ada obrolan dari Pak Sekda (Maesyal Rasyid), katanya bakal dibayar den-

gan ABT (anggaran belanja tahunan) 2021 terkait pemakaian sekolah. Tapi, yataunya sampai saat ini tidak ada upaya itu," katanya.

Ia menuntut Pemerintah Kabupaten Tangerang segera membayar ganti rugi terkait pemakaian lahan untuk sekolah. "Kalau kami menuntut agar pemda melakukakan ganti rugi, karena selama ini sudah 45 tahun berdiri tanpa ada koordinasi dengan ahli waris," katanya.

Malarina, orang tua salah satu siswa SDN Kiarapayung, menyampaikan kekecewaannya karena sekolah disegel pada hari pertama pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). "Apalagi ini kan dibuka setelah ada pelanggaran, belajar tertunda. Saat mau mulai PTM kenapa begini," katanya.

"Bingung saya sebagai orang tua murid. Saya harap pemerintah segera menyelesaikan masalah ini," kata dia menambahkan.

Ia berharap pemerintah kabupaten segera menuntaskan masalah sengketa tanah tersebut agar pedagang dan pengunjung di sekolah bisa segera dilaksanakan kembali. ● pp

KPK Dalam Pembelian Harga Tanah untuk Pembangunan SMKN 7 Tangsel

TANGSEL (IM)- Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelidik kepemilikan tanah terkait korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 menjadi perhatian khusus lembaga antirasuah.

"Terkait perkara ini KPK memberikan atensi lebih, karena proyek pengadaan ini sangat penting bagi dunia pendidikan, khususnya di wilayah Tangerang Selatan," kata Ali, Selasa (14/9) lalu.

Menurut Ali, perbuatan para pihak dalam kasus ini tak hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga kerugian sosial di dunia pendidikan. Atas dasar itu, Ali meminta masyarakat untuk terus mengawasi dan mengawal proses penangan kasus ini. "Ulah dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara ini mengakibatkan tidak hanya dugaan kerugian keuangan negara akan tetapi juga kerugian sosial. Dukungan dan peran serta masyarakat sangat kami perlukan," kata Ali.

Nurdiansyah (swasta). KPK menyebut pengusutan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 menjadi perhatian khusus lembaga antirasuah.

"Saat ini, KPK memulai penyidikan baru dugaan tindak pidana korupsi terkait pengadaan tanah untuk pembangunan SMKN 7 Tangerang Selatan," ujar Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri beberapa waktu lalu.

Ali menyatakan pihaknya belum bisa membeberkan lebih jauh konstruksi serta pihak yang akan diminta pertanggungjawaban oleh KPK. Hal tersebut berdasarkan keputusan pimpinan KPK era Komjen Pol Firdi Bahun. "Penyampaian informasi dan pengumuman secara lengkap akan dilakukan pada saat upaya paksa penangkapan dan atau penahanan dilakukan," kata Ali. ● pp

ANCAM DEMO BESAR-BESARAN

AB3 Usulkan Kenaikan UMP Banten 8,95% dan UMK 13,50% Tahun 2022

CILEGON (IM)- Serikat pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) segera mengusulkan kenaikan upah tahun 2022 ke Provinsi Banten. AB3 meminta untuk tahun 2022 upah minimum provinsi (UMP) Banten naik 8,95% dan upah minimum kota/kabupaten (UMK) se-Banten naik 13,50%.

Selain itu, upah minimum sektoral kota/kabupaten (UMSK) untuk tahun 2021 dan 2022 juga diminta untuk diberlakukan. Presidium AB3,

Dedi Sudarajat menjelaskan, pihaknya meminta kenaikan UMP Banten tersebut berdasarkan pertumbuhan ekonomi Banten dan tahun ke tahun (year on year). "Sedangkan kenaikan UMK sebesar 13,50% berdasarkan survei pasar KHL (kebutuhan hidup layak)," ujarnya, Selasa (26/10).

Ketua KSPSI Banten ini menuturkan, usulan kenaikan upah tahun 2022 tersebut segera disampaikan ke Gubernur Banten melalui audiensi dengan Kepala Disnakertrans Banten pada Selasa

siang. "Usulan yang kami bawa ini dasarnya jelas. Jadi, keputusannya harus sesuai," tegasnya.

Adapun jika nanti tanggal 1 November 2021 SK Gubernur Banten tentang Kenaikan Upah Minimum Provinsi Banten tidak sesuai dengan usulan AB3, maka AB3 akan demo. "Kalau usulannya tidak sesuai, besoknya yaitu tanggal 2 November 2021 AB3 akan melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan kantor Gubernur Banten," pungkasnya. ● pra



IDN/ANTARA

UJI EMISI GRATIS DI TANGERANG SELATAN

Petugas dari Badan Lingkungan Hidup Daerah kota Tangerang Selatan melakukan uji emisi gratis kepada setiap kendaraan pribadi dan umum yang melintas di Jalan Letnan Soetopo, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Selasa (26/10). Uji emisi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencemaran udara yang dihasilkan kendaraan bermotor di Kota Tangerang Selatan.

Banyak Plt Kepsek di Banten tak Lolos Tes Calon Kepala Sekolah

SEERANG (IM)- Sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kujuruan (SMK) Negeri di Provinsi Banten, masih mengalami kekurangan kepala sekolah definitif, sehingga Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat menggandeng Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan tes calon kepala sekolah (Cakap) terhadap 493 guru, termasuk yang sudah lama menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas) kepala sekolah di Sawangan, Depok, Jawa Barat.

Hasilnya sungguh mengejutkan, dari 493 orang yang mengikuti tes calon kepala sekolah itu, hanya 117 orang yang dinyatakan layak untuk menjadi kepala sekolah, dan selanjutnya bagi mereka akan dilakukan pendidikan dan latihan (Diklat) kepala sekolah untuk mendapatkan NUKS (Nomor Unik Kepala Sekolah).

Mirisnya, kebanyakan dari Plt kepala sekolah, baik SMA Negeri maupun SMK Negeri yang sudah lama menjabat, tidak lolos dan dinyatakan tidak layak menjadi kepala sekolah.

"Justru kebanyakan dari Plt kepala sekolah yang sudah lama menjabat tidak lulus tes Cakap dan dinyatakan tidak layak menjadi kepala sekolah," ungkap sumber di Dindikbud Banten, Selasa

(26/10).

Berdasarkan surat Dindikbud Banten Nomor 421/2479- Dindikbud/2021 tentang pemberitahuan hasil seleksi substansi calon kepala sekolah (BCKD) SMAN dan SMKN yang ditandatangani oleh kepala Dindikbud Banten, Tabrani, terdapat 493 peserta tes Cakap dan yang dinyatakan lolos, dan yang dinyatakan layak sebagai kepala sekolah kurang dari separuh.

"Berdasarkan hasil seleksi yang digelar di LP2KS Sawangan, Depok, Jawa Barat, hanya 117 yang dinyatakan lolos dari 493 peserta," imbuhnya.

Ia mengatakan, ada empat aspek yang menjadi penilaian dalam seleksi Cakap tersebut, terdiri dari respon situasional, respon kreativitas dan pemecahan masalah secara kreatif, respon wawasan kepemimpinan, serta pengambil keputusan berdasarkan bukti-bukti.

Kepala Dindikbud Banten, Tabrani yang dikonfirmasi mengatakan, Dindikbud Banten hanya mengirimkan peserta ke LP2KS (Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah), dan selanjutnya kewenangan seleksi sampai dengan hasil ada di lembaga yang melaksanakan tes calon kepala sekolah tersebut.

"Kami hanya mengirimkan peserta ke LP2KS, selanjutnya kewenangan seleksi dan hasil ada di sana," terang Tabrani. ● pra



IDN/ANTARA

UMKM BATIK KUDUS BINAAN PERTAMINA

Perajin menyelesaikan pembuatan kerajinan batik khas Kudus di "Muria Batik Kudus", Jawa Tengah, Selasa (26/10). Muria Batik Kudus sebagai mitra UMKM binaan Pertamina memiliki motif khas kudusan seperti motif kawung kretek, menara kudus, kapal kandas, parijoto dan ukir gebyog hingga motif kaligrafi yang dijual dengan kisaran harga Rp135.000- Rp20 juta per potong.

Belum Divaksin, 176 Guru di Kota Bogor Tidak Diperkenankan Mengajar PTM

BOGOR (IM)- Sebanyak 176 dari 3.435 guru di Kota Bogor tidak diperkenankan melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) lantaran belum divaksin. Mereka hanya diperkenankan mengajar secara daring. Pelaksanaan PTM terbatas di Kota Bogor, sudah berjalan hampir satu bulan. Awal pekan ini, jumlah sekolah tingkat SD dan SMP yang menggelar PTM mulai bertambah.

Kepada Dinas Pendidikan Kota Bogor, Hanafi menuturkan, dari evaluasi berkala yang dilakukan, ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Di antaranya vaksinasi Covid-19 terhadap guru dan tenaga pendidik. Sebab, Hanafi mengatakan, guru dan tenaga pendidik yang belum divaksinasi, belum boleh mengajar pada pelaksanaan PTM terbatas di Kota Bogor saat ini.

Hanafi mengaku, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah di bawah kendali Disdik Kota Bogor, mengenai belum diperbolehkannya guru yang belum divaksinasi untuk mengajar saat PTM.

"Sudah surat edaran, guru yang belum divaksin belum bisa mengajar di PTM terbatas. Jadi daring dulu," kata Hanafi, Selasa (26/10).

Menurutnya, ada sekitar 176 guru dan tenaga pendidik yang belum divaksinasi dengan berbagai alasan. Mulai dari mereka yang memiliki penyakit bawaan atau komorbid, lalu mereka yang penyintas Covid-19. "Kami terus beri pemahaman. Untuk komorbid kami minta dahulu pemeriksaan dokter spesialis yang mengeluarkan rekomendasi boleh tidaknya divaksin. Bagi yang nggak mau, kami beri pemahaman terus. Intinya kalau belum divaksin, (mengajar) daring dulu," tegasnya.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kota Bogor dilaporkan sebanyak 3.435 guru dan tenaga kependidikan. Dari jumlah itu, 3.259 orang sudah mendapat kendali Disdik Kota Bogor, mengenai belum diperbolehkannya guru yang belum divaksinasi untuk mengajar saat PTM. ● gio